



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PUPUK INDONESIA GROUP  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WONO BUDI TJAHYONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN & INVESTASI**
3. NHK : **124979**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.621.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 608 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
3. Tanah Seluas 1297 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.367.000.000
4. Tanah Seluas 1685 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000
5. Tanah Seluas 1668 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.634.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 951.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, BMW SEDAN 320I Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
4. MOTOR, VESPA LX125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 130.705.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 3.623.413.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.985.553.079



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
Sub Total	Rp.	17.312.171.079
III. HUTANG	Rp.	12.855.456
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.299.315.623

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.